

Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik



ISSN (online): [2657-0092](https://doi.org/10.25077/jakp) | ISSN (print): [2301-4342](https://doi.org/10.25077/jakp) | DOI:
10.25077/jakp

Website: <http://jakp.fisip.unand.ac.id>

**ALOKASI BELANJA NEGARA (KOMPARASI BESARAN TUNJANGAN
SEBELUM DAN SESUDAH PERAMPINGAN JABATAN PADA
UNIT ESELON I PUSAT KEMENTERIAN AGAMA)**

Haerul Umam

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

* heroe_yach@yahoo.com

Diterima: 25/06/2021

ABSTRACT

Restructuring policies in government agencies continue to be carried out in accordance with directives issued by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, including restructuring Echelon positions at the Ministry of Religion, given the absence of related literature in the Ministry of Religion. It is necessary to do research on comparisons in the situation before simplification and further estimates, in this study the focus of the discussion is on the number of allowances for Echelon Unit I in the central office. The method used in this research is a literature study, with reliable data sources and analysis in the form of a comparative study which can later be used as the basis for implementing restructuring in general, especially in national budget planning at the Ministry of Religion. The results showed that there were several changes in income due to downsizing, including a decrease in the performance allowance received by Echelon III officials who were transferred to Associate Experts (Ahli Madya), while the difference in allowances between positions was not significant for Echelon IV officials who are transferred to the functional positions of Associate Expert (Ahli Madya) and Junior Expert. (Ahli Muda) increase in take home pay in terms of position allowance income. The subject of further discussion with this change is how it affects the performance of officials and their effectiveness in the bureaucracy.

Keywords: Downsizing, National Budget, Positional Allowance, Restructuration

ABSTRAK

Kebijakan restrukturisasi dalam instansi pemerintahan terus dilakukan sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, termasuk perampingan jabatan Eselon di Kementerian Agama, mengingat belum adanya literatur terkait di Kementerian Agama, maka perlu adanya penelitian tentang komparasi (perbandingan) saat situasi sebelum penyederhanaan dan perkiraan setelahnya, dalam penelitian ini fokus membahas dalam hal besaran tunjangan untuk unit eselon I Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, dengan sumber data terpercaya serta analisis berupa ulasan perbandingan yang nantinya bisa dijadikan bahan untuk dasar pelaksanaan restrukturisasi terutama dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa perubahan penghasilan atas perampingan jabatan tersebut, diantaranya penurunan tunjangan kinerja yang diterima pejabat Eselon III yang dimutasi menjadi Ahli Madya sedangkan untuk selisih tunjangan antara posisi itu tidak signifikan pejabat Eselon IV yang dimutasi ke dalam jabatan fungsional Ahli Madya maupun Ahli Muda mengalami kenaikan take home pay dari sisi penghasilan tunjangan jabatan. Bahan diskusi selanjutnya dengan adanya perubahan ini bagaimana dampaknya terhadap kinerja pejabat dan efektivitasnya terhadap jalur birokrasi.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Perampingan Jabatan, Restrukturisasi ; Tunjangan Pejabat

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMPANRB) menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Permen tersebut merupakan acuan dasar untuk pelaksanaan restrukturisasi dalam Instansi Pemerintahan. penyederhanaan birokrasi salah satu poin penting untuk membangun efektifitas dan efisiensi birokrasi, serta fungsionalitas sumber daya manusia (SDM).

Pada 13 November 2019 Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Surat tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi. Langkah dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan. Perampingan jabatan Eselon ini tentu saja akan berdampak pada anggaran, rencana strategi telah disusun dalam untuk pelaksanaannya (KemenPAN&RB, 2020).

Sejumlah peneliti telah membuat penelitian terkait strategi perencanaan di sebuah instansi. Misalnya penelitian Rakhman (2020) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang analisis kompensasi atas penghapusan jabatan eselon III dan IV di pusat. Kemudian, penelitian

Tumanggor & Wibowo (2020) terkait motivasi kerja dan kinerja pegawai negeri sipil pasca implementasi pengalihan jabatan struktural eselon. Dua penelitian itu sangat menarik karena terkait anggaran dan bagaimana perubahan kinerja yang akan berpengaruh terhadap sistem birokrasi. Begitu juga dengan penelitian Wahab (2019) yang dapat menjadi pijakan untuk studi komparasi anggaran.

Di Kementerian Agama, literatur semacam itu belum banyak karena perubahan tersebut masih dalam proses. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang komparasi (perbandingan) saat situasi sebelum penyederhanaan dan perkiraan setelah penyederhanaan. Penelitian ini fokus membahas besaran tunjangan untuk unit eselon I Pusat Kementerian Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan adanya perampingan jabatan, khususnya pada eselon III dan IV pada Eselon I Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka/*literature review*. Creswell (2016) menyatakan, *literature review* dimulai dengan perumusan masalah untuk desain penelitian, pengumpulan data, evaluasi data, analisis dan interpretasi data, dan penyajian hasil melalui laporan hasil penelitian.

Data kepegawaian Kementerian Agama merupakan rujukan utama dalam pengumpulan data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pejabat Eselon I, II, III, IV dan pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Eselon I pusat Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdiri dari (Kemenag, 2019)

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
8. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Litbang dan Diklat Keagamaan; dan
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Dengan jumlah sampel sebanyak 1.414 pegawai. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara pengambilan sampel klaster, yaitu kelompok yang mempunyai sifat heterogen diidentifikasi terlebih dahulu kemudian dipilih secara acak (Kuncoro, 2003). Evaluasi dan analisis data menggunakan alat Microsoft Excel untuk mengolah data secara statistik dan disajikan secara kuantitatif deskriptif (Arikunto, 2011)

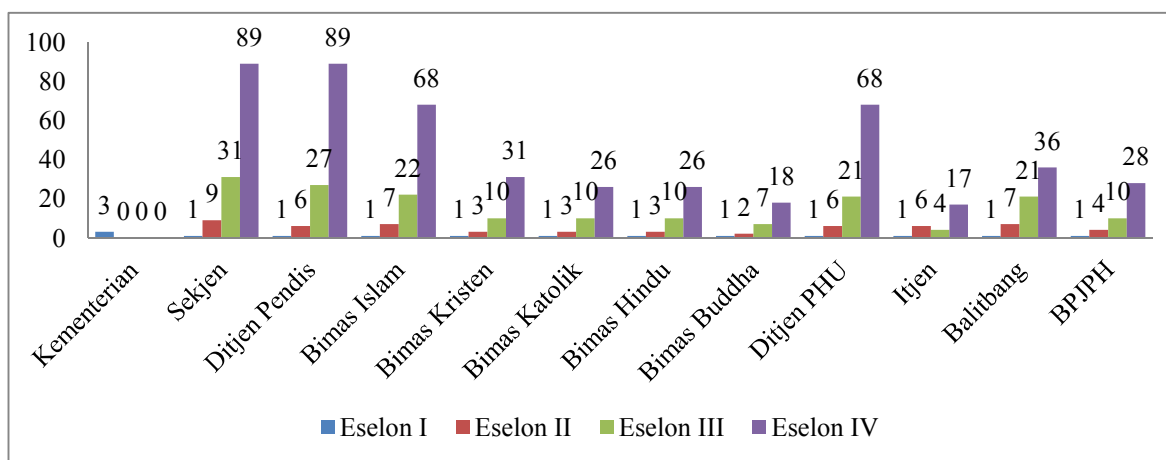
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 12 unit kerja berhasil didapatkan data kepegawaiannya. Eselon terbanyak adalah dari Sekretariat jenderal, sementara yang paling sedikit dari Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Selengkapnya disajikan di tabel 1 berikut ini;

Tabel 1. Data Pegawai berdasarkan Jabatan Eselon

Unit Kerja	Eselon				Jumlah
	I	II	III	IV	
Kementerian	3	0	0	0	3
Sekjen	1	9	31	89	130
Ditjen Pendis	1	6	27	89	123
Bimas Islam	1	7	22	68	98
Bimas Kristen	1	3	10	31	45
Bimas Katolik	1	3	10	26	40
Bimas Hindu	1	3	10	26	40
Bimas Buddha	1	2	7	18	28
Ditjen PHU	1	6	21	68	96
Itjen	1	6	4	17	28
Balitbang	1	7	21	36	65
BPJPH	1	4	10	28	43
Jumlah	14	56	173	496	739
Persentase %	1,89	7,58	23,41	67,12	100,00

Sumber: Kementerian Agama 2019



Gambar 1. Jumlah Pejabat Eselon di Kementerian Agama

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Tabel 2. Data Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan	Jumlah	Jenjang				
		Utama	Madyam	Muda	Pertama	penyeiia
2	3	4	5	6	7	8
Analisis Kepegawaian	43	0	7	22	6	8
Arsiparis	67	0	4	23	15	25
Auditor	277	0	42	69	166	0
Dokter	15	0	12	3	0	0
Perawat	4	0	0	0	0	4
Litkayasa	11	0	0	0	0	11
Peneliti	71	6	28	21	16	0
Perencana	41	1	4	25	11	0
Pranata Humas	15	0	2	6	7	0
Pranata Komputer	57	0	1	21	35	0
Pustakawan	5	0	0	3	2	0
Widya Iswara	39	4	17	16	2	0
Statistisi	9	0	0	5	4	
Perekayasa	0	0	0	0	0	0
Analisis Kebijakan	5	0	4	1	0	0
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	16	0	1	6	9	0
Jumlah	675	11	121	221	273	48

Sumber : Kementerian Agama, 2019

Perampangan jabatan atau perpindahan jabatan Eselon III dan IV kepada jabatan fungsional tertentu, akan mengakibatkan terjadinya perbedaan penerimaan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja oleh masing-masing pegawai (Irfan, 2013). Dalam penelitian ini, besarnya adalah sebagai berikut

Tabel 3. Tunjangan Jabatan Struktural

Eselon	Besar Tunjangan
I A	Rp. 5.500.000
I B	Rp. 4.375.000
II A	Rp. 3.250.000

II B	Rp. 2.025.000
III A	Rp. 1.260.000
III B	Rp. 960.000
IV A	Rp. 540.000
IV B	Rp. 490.000
V A	Rp. 360.000

Sumber : Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007

Tabel 4. Tunjangan Kinerja Pada Kementerian Agama R.I

Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Perkelas Jabatan	
17	Rp	29.085.000
16	Rp	20.695.000
15	Rp	14.721.000
14	Rp	11.670.000
13	Rp	8.562.000
12	Rp	7.271.000
11	Rp	5.183.000
10	Rp	4.551.000
9	Rp	3.781.000
8	Rp	3.319.000
7	Rp	2.928.000
6	Rp	2.702.000
5	Rp	2.493.000
4	Rp	2.350.000
3	Rp	2.216.000
2	Rp	2.089.000
1	Rp	1.968.000

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018

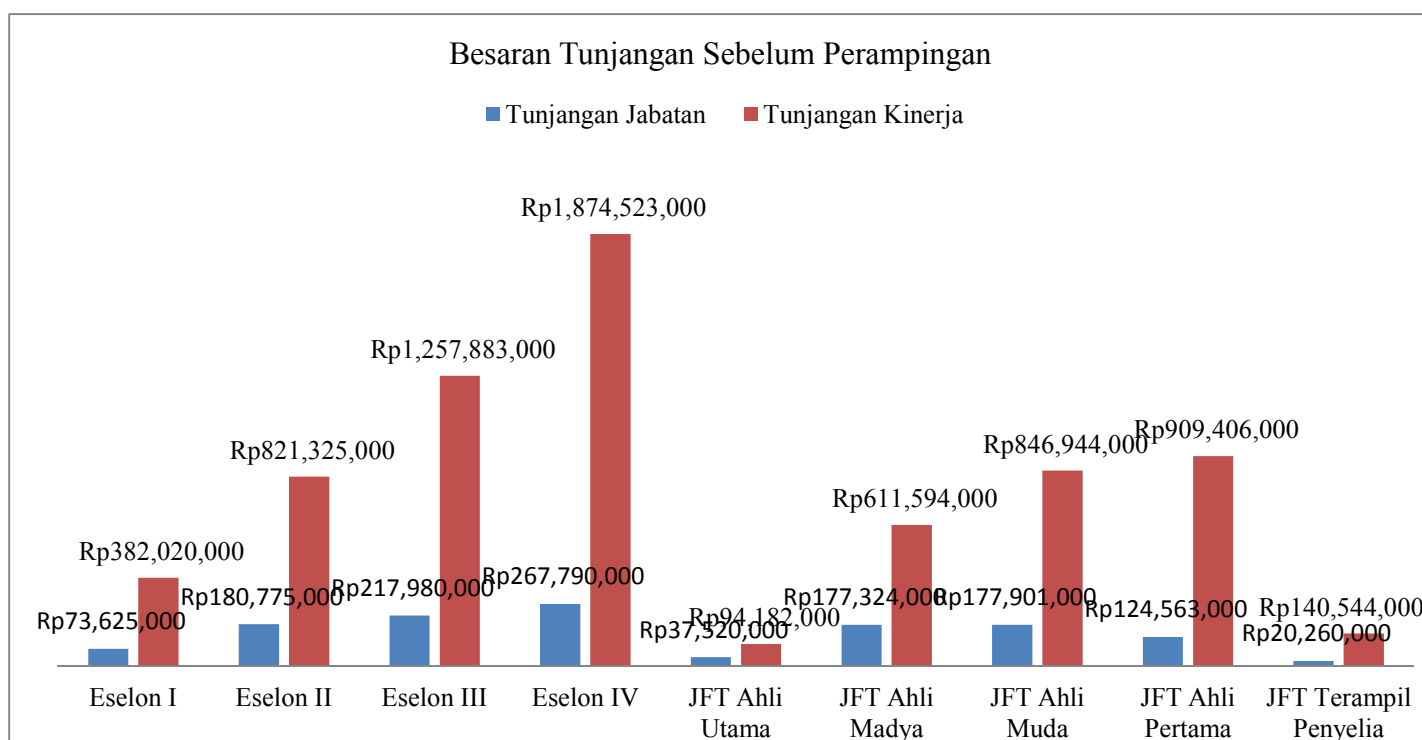
Adapun besarnya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang didapat oleh masing-masing tergantung dari jabatan fungsional yang akan di ampunya nanti (Kemenkeu, 2020). Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi sudah mengirimkan usulan perampingan atau perpindahan jabatan ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) selaku *leading sector* dalam hal ini. Jumlah usulan tersebut seperti tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. Komposisi Usulan Perpindahan Jabatan/Perampingan Jabatan

Komposisi Jabatan	Sebelum	Sesudah
Eselon I	14	14
Eselon II	56	56
Eselon III	173	142
Eselon IV	496	276
JFT Utama	11	11
JFT Madya	118	181
JFT Muda	224	412
JFT Pertama	274	274
JFT Penyelia	48	48

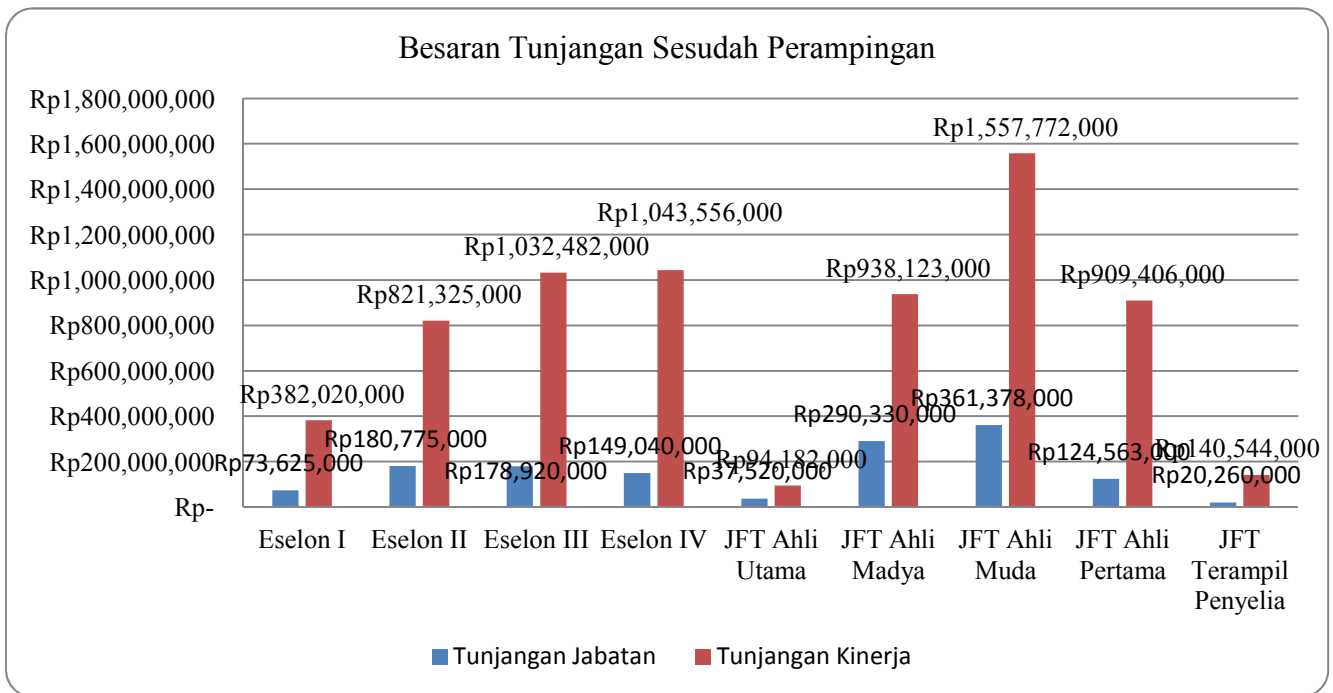
Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

Dari Tabel.5 terlihat bahwa komposisi pejabat eselon IV yang diusulkan migrasi kedalam jabatan fungsional lebih banyak dibandingkan dengan pejabat eselon III. Angka-angka diatas menggambarkan bahwa pejabat eselon III diusulkan kedalam jabatan fungsional ahli Madya yaitu sebanyak 31 orang, sedangkan untuk pejabat eselon IV yang diusulkan kedalam jabatan fungsional sebanyak ahli Madya sebanyak 32 orang, selebihnya diusulkan kedalam jabatan fungsional ahli Muda yaitu sebanyak 188 orang. Data-data tersebut penulis sajikan ke dalam grafik berikut ini :



Gambar 2. Besaran Tunjangan Sebelum Perampingan

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2020



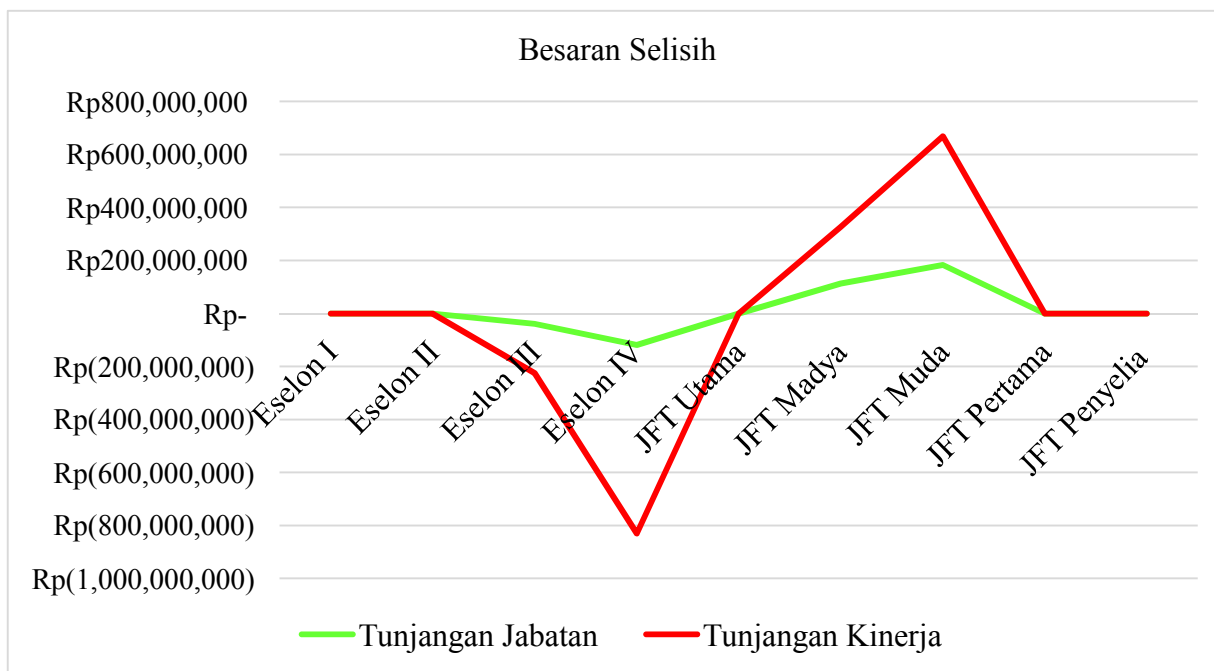
Gambar 3. Besaran Tunjangan Sesudah Perampingan

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Tabel 6. Komparasi Besaran APBN Sebelum dan Sesudah Perampingan

Komparasi APBN Sebelum & Sesudah Perampingan Jabatan	Selisih Tunjangan Jabatan		Selisih Tunjangan Kinerja		Persentase % Tunjangan Jabatan	Persentase % Tunjangan Kinerja
Eselon I	Rp	-	Rp	-	0	0
Eselon II	Rp	-	Rp	-	0	0
Eselon III	-Rp	39.060.000	-Rp	225.401.000	-17,92	-17,92
Eselon IV	-Rp	18.750.000	-Rp	830.967.000	-44,34	-44,33
JFT Utama	Rp	-	Rp	-	0	0
JFT Madya	Rp	113.006.000	Rp	326.529.000	63,73	53,39
JFT Muda	Rp	183.477.000	Rp	669.237.000	103,13	79,02
JFT Pertama	Rp	-	Rp	-	0	0
JFT Penyelia	Rp	-	Rp	-	0	0

Sumber : Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007



Gambar 4. Besaran Selisih Tunjangan

Sumber: Hasil pengolahan Data 2020

Dari hasil pengolahan data komparasi besaran Tunjangan jabatan sebelum dan sesudah adanya perampingan jabatan pada Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia, dapat diketahui adanya penurunan atau penghematan APBN sebesar Rp. 39.060.000,- atau sama dengan 17,92% pada jabatan eselon III dan penghematan APBN sebesar Rp. 118.750.000,- atau setara dengan 44,34% pada jabatan eselon IV. Ini terjadi dikarenakan migrasinya sebagian besar pejabat eselon III dan IV pada jabatan fungsional. (Tabel.6)

Sebaliknya tunjangan jabatan pada posisi jabatan fungsional ahli Madya dan Ahli Muda terjadi kenaikan sangat signifikan, yaitu sebesar Rp. 113.006.000,- sama dengan 63,73% untuk jabatan fungsional ahli madya dan sebesar Rp. 183.477.000,- yang setara dengan 103,13% untuk jabatan fungsional ahli muda. Ini disebabkan oleh migrasinya pemangku jabatan eselon III dan IV pada jabatan fungsional ahli madya serta beberapa pemangku jabatan eselon IV pada fungsional ahli muda. (Tabel. 6)

Di sisi lain hasil pengolahan data komparasi besaran tunjangan kinerja, sebelum dan sesudah ada perampingan jabatan terjadi penurunan atau penghematan beban APBN yang besarnya kurang lebih sama dengan penghematan yang terjadi pada besaran tunjangan jabatan sesudah adanya perampingan struktural yaitu sebesar 17,92% untuk jabatan eselon III dan 44,43% untuk jabatan eselon IV.

Hal ini disebabkan oleh turunnya kelas jabatan tunjangan kinerja eselon III dari kelas 12 menjadi kelas 11 pada posisi jabatan fungsional ahli Madya. Kenaikan pada Tunjangan Kinerja

jabatan fungsional Ahli Muda sesudah Perampangan Jabatan, sebesar Rp. 669.237.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) atau sama dengan 79,02%. Sedangkan pada Tunjangan Kinerja Jabatan fungsional Ahli Madya terjadi kenaikan sebesar Rp 326.529.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) atau sama dengan 53,39%.

Dari hasil pengolahan selisih besaran tunjangan jabatan sebelum dan sesudah perampangan jabatan terjadi kenaikan beban APBN sebesar Rp. 138.673.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah), atau setara dengan 1,66%, sedangkan pada tunjangan kinerja justru sebaliknya, terjadi penurunan atau penghematan APBN sebesar Rp. 19.011.000,- (sembilan belas juta sebelas ribu Rupiah), atau setara dengan 0,27%. Selanjutnya dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan perampangan jabatan pada Kementerian dan Lembaga Negara ada kenaikan beban APBN sebesar 1,66%. Namun demikian dapat pula penulis sampaikan bahwa kenaikan anggaran atau defisit tersebut (Gischa, 2019), sesuai dengan hasil rapat kerja Pemerintah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menyepakati adanya defisit anggaran sebesar 1,76% pada gambaran sementara APBN Tahun 2020.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat penurunan tunjangan kinerja yang diterima oleh pejabat Eselon III yang dimasukkan kedalam jabatan fungsional tertentu Ahli Madya, sedangkan selisih tunjangan jabatan antara eselon III dan fungsional Ahli Madya tidak begitu signifikan tergantung dari fungsional yang akan didudukinya, meski tetap ada penurunan *take home pay*.

Selanjutnya pejabat Eselon IV yang dimutasi ke dalam jabatan fungsional Ahli Madya maupun Ahli Muda mengalami kenaikan *take home pay* dari sisi penghasilan tunjangan jabatan, sedangkan untuk tunjangan kinerja, pejabat Eselon IV yang mengalami kenaikan *take home pay* adalah yang diusulkan ke dalam jabatan fungsional Ahli Madya, adapun untuk Ahli Muda tidak ada perubahan karena setara. Semakin banyak pejabat Eselon IV yang dimasukkan kedalam jabatan fungsional Ahli Muda, dapat disimpulkan akan berakibat semakin besar beban APBN dalam hal anggaran belanja Pegawaiinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Gischa, S. (2019). *Defisit Anggaran : Faktor, Dampak dan Cara Mengatasinya* <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/180000269/defisit-anggaran-faktor-dampak-dan-cara-mengatasinya>.
- Irfan, M. (2013). The Reposition of Structural to Functional Position: Study Of Elimination of The Eselon III and IV Position at Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 7(1), 40–55.
- Kemenag. (2019). *Statistik PNS Kementerian Agama 2019*. <https://ropeg.kemenag.go.id/statistik-pns-kementerian-agama-ri-tahun-2019>.
- Kemenkeu. (2020). *APBN 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>.
- KemenPAN RB. (2020). *Penyederhanaan Birokrasi Ditargetkan Selesai di Tahun 2020*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-birokrasi-ditargetkan-selesai-di-tahun-2020>
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Erlangga.
- Rakhman, F. A. (2020). *Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisis Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan*. 4(2), 53–66.
- Tumanggor, F. ., & Wibowo, W. (2020). Motivasi Kerja Dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III, IV Dan V Ke Jabatan Fungsional Di Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Sumber Daya Aparatur Negara*, 3(1), 54–72.
- Wahab, A. (2019). Alokasi Belanja Negara (Studi Komparasi Era Rasulullah dan Khulafauryidin dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019). *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 2614–1124. <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/63>